

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN *STUNTING* OLEH DESA SAGULING KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Sinta Nuramalia¹, Agus Dedi², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : SintaNuramalia@gmail.com

ABSTRAK

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pencegahan stunting di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Agustino (2016:137), hal ini dikarenakan masih adanya beberapa status stunting seperti masih adanya balita kurang gizi yang disebabkan kurangnya pemerintah desa dalam memberikan perhatian dengan memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang jelas kepada petugas pelaksana dalam melakukan pencegahan stunting sehingga petugas kesulitan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Begitupula dengan observasi yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi kebijakan pencegahan stunting belum optimal mengingat kurangnya program yang jelas dari pemerintah desa mengenai pencegahan stunting dan kurangnya dukungan anggaran yang diberikan kepada masyarakat serta jaranganya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini kader kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dengan pencegahan stunting.

Kata Kunci : *Implementasi, Kebijakan, Pencegahan Stunting*

PENDAHULUAN

Stunting menjadi permasalahan yang menghantui pada pertumbuhan anak di Indonesia. Sehingga untuk

mencetak anak di Indonesia yang sehat dan cerdas, langkah awal yang paling penting untuk dilakukan adalah pemenuhan gizi pada anak sejak usia

dini. Pada hakekatnya penyebab dasar terjadinya masalah kurang gizi adalah masalah ekonomi yang ditandai dengan rendahnya daya beli masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga yang dapat menyebabkan rendahnya asupan zat gizi. Selain disebabkan rendah asupan zat gizi maka pola pengasuhan Balita yang kurang baik dan buruknya kondisi sanitasi lingkungan dan kurang tersedianya sarana air bersih serta kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan, juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya infeksi yang berulang yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya masalah masalah kurang gizi.

Mengingat penyebab masalah gizi adalah multifaktor maka upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah kurang gizi harus melalui pendekatan multisektor. Artinya bahwa penanggulangan masalah kurang gizi tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja tetapi juga dilakukan bersama-sama dengan sektor diluar bidang kesehatan. Sektor lain diluar kesehatan yang memiliki peranan penting dalam penanggulangan masalah gizi antara lain adalah sektor ekonomi, pekerjaan umum, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pendidikan dan sektor terkait lainnya

Oleh karena itu dalam pencegahan stunting melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah desa yang tertuang dalam pasal 6 ayat 2 huruf c Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dinyatakan bahwa penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan.

Selanjutnya dalam pedoman umum penggunaan dana desa tahun 2021 dinyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional salah satunya meliputi pencegahan stunting.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2020 diketahui bahwa kasus stunting di Kabupaten Ciamis sebanyak 4.579 orang. Selanjutnya berdasarkan data Puskesmas di Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis tahun 2020 diketahui angka stunting di Desa Saguling sebanyak 14 kasus (4 balita sangat pendek dan 10 balita pendek), gizi kurang sebanyak 12 kasus bawah garis merah sebanyak 1 kasus dan balita kurus sebanyak 3 kasus.

Permasalahan-permasalahan tersebut jika dibiarkan maka akan meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pada balita, hal ini sejalan dengan pendapat Supriasa (2012:87) bahwa : “Balita yang terganggu pertumbuhannya rentan terkena penyakit baik dalam jangka pendek seperti penyakit diare dan penyakit

infeksi lainnya maupun dalam jangka panjang seperti nilai IQ anak berkurang 5-10 poin, menurunkan produktivitas pada usia dewasa bahkan beresiko terkena penyakit tidak menular (Diabetes tipe 2, Jantung, stroke, dan sebagainya)”.

Berdasarkan pendapat tersebut maka perlu adanya kebijakan yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut sehingga petugas dapat mengimplementasikan kebijakan tersebut secara optimal.

Menurut Gafar (2013:56) menyatakan bahwa : ”Implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan”.

Namun demikian implementasi kebijakan pencegahan stunting di Desa Saguling belum diimplementasikan dengan baik karena kurangnya anggaran yang disediakan bagi pencegahan stunting sehingga kader kesehatan yang ada di tiap RT kesulitan dalam pemberian makanan tambahan bagi bayi selain itu bayi balita yang terganggu pertumbuhannya kurang mendapatkan bantuan pangan non tunai.

Begitupula dengan hasil observasi penulis, terlihat bahwa implementasi kebijakan pencegahan stunting di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum optimal, seperti ditunjukkan dari indikator-indikator sebagai berikut :

1. Pemerintah desa belum optimal dalam memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan kader posyandu. Contohnya : Kader yang ada di tiap RT kesulitan dalam pemberian makan bayi dan anak (PMBA) secara rutin karena keterbatasan anggaran yang dimiliki hal ini karena dalam RKPdesa telah ditentukan anggaran untuk pencegahan stunting hanya sebesar Rp. 1.750.000 untuk satu tahun sedangkan dalam rencana kader setiap satu minggu sekali melakukan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi balita sehingga total yang dibutuhkan kader sebetulnya sebesar Rp. 7.500.000.
2. Pemerintah desa belum optimal dalam memberikan asupan makanan bergizi kepada anak balita yang kekurangan gizi. Contohnya : Pemerintah desa belum memberikan bantuan pangan non tunai dalam mengatasi permasalahan gizi anak balita.
3. Pemerintah desa kurang memberikan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan bagi bayi atau balita yang kekurangan gizi. Contohnya : kurangnya kejelasan program dari pemerintah desa dalam memberikan bantuan uang tunai bagi keluarga kurang mampu dalam mengatasi masalah kekurangan gizi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : "Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis".

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini peneliti melihat adanya suatu permasalahan terkait Implementasi kebijakan pencegahan stunting di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis yang belum optimal. Adapun kaitan masalah Implementasi kebijakan pencegahan stunting dengan bidang kajian ilmu pemerintahan antara lain dikemukakan oleh Syafiie (2011:21) mendefinisikan bahwa : "Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerin tahan, secara baik dan benar".

Dengan demikian Implementasi kebijakan pencegahan stunting merupakan salah satu kajian ilmu pemerintahan karena implementasi kebijakan pencegahan stunting merupakan kewajiban pemerintah terhadap warganya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Menurut Edward III dalam Agustino, (2016:139), mendefinisikan

implementasi kebijakan sebagai: "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan".

Selanjutnya menurut Agustino (2016:137) menyatakan terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik karena dengan dilakukannya komunikasi yang baik maka implementator akan dapat secara konsisten melaksanakan setiap kebijakan. Untuk mengukur keberhasilan komunikasi antara lain :

- a. Transmisi/penyaluran informasi
- b. Kejelasan dalam menyampaikan informasi
- c. Konsistensi dalam memberikan perintah

2. Sumber daya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya dalam organisasi. Adapun indikator sumber daya meliputi :

- a. Adanya dukungan pegawai yang memadai serta memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan.
- b. Adanya informasi terkait cara melaksanakan kebijakan
- c. Adanya wewenang yang jelas kepada pelaksana kebijakan

d. Adanya dukungan fasilitas yang memadai bagi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan berupa tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan. Sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan antara lain :

- a. Adanya kesesuaian dalam penentuan pegawai yang melaksanakan kebijakan
- b. adanya pembagian kerja sesuai dengan kemampuan pegawai
- c. adanya pemberian insentif sebagai motivasi bagi pelaksana kebijakan

4. Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya struktur birokrasi yang dapat meningkatkan kerjasama dan suasana kondusif di dalam lingkungan kerja.

- a. Adanya SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan
- b. adanya standar kerja bagi pelaksana kebijakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari
- c. Adanya pembagian tanggungjawab kepada masing-masing petugas pelaksana untuk memudahkan implementasi kebijakan

Keempat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan dijadikan pedoman bagi penulis dalam melakukan analisis terkait dengan implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Dinas Kesehatan di Desa Saguling

Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.

METODE

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik. Kegiatan komunikasi untuk memastikan apakah implementasi sudah sesuai dengan isi kebijakan publiknya. Komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun, komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa selama ini sosialisasi tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat di desa sangat penting karena hal ini menyangkut dengan kesehatan masyarakat, namun memang selama ini masih kurangnya program yang jelas dari pemerintah desa dan para kader kesehatan di desa untuk mensosialisasikan tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa, selain itu masih kurangnya keaktifan dari kader kesehatan di desa sehingga informasi tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa kurang tersampaikan secara jelas dan terperinci, serta keseriusan dan komitmen dari pemerintah desa dan kader kesehatan di desa sangat penting agar dapat konsisten dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa, namun memang karena masih kurangnya dukungan sehingga terkadang kurang konsisten dalam melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Handyaningrat (2013:114) menyatakan bahwa kebijakan adalah : “Pernyataan-pernyataan atau pengertian-pengertian umum yang memberikan bimbingan berfikir dalam menentukan keputusan yang fungsinya adalah menandai lingkungan sekitar yang dibuat sehingga memberikan jaminan bahwa keputusan-keputusan itu akan sesuai dengan tercapainya tujuan”.

Dengan demikian perlu adanya kejelasan program untuk melaksanakan suatu program agar dapat dilaksanakan secara optimal selain itu suatu program pun harus di tunjang dengan keaktifan pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan agar kebijakan suatu program dapat tersampaikan secara merata dan menyeluruh terhadap masyarakat yang membutuhkannya.

2. Sumber daya

Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan dan atura-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan yang kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya merupakan faktor kedua setelah komunikasi yang akan turut mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya kebijakan merupakan segala sesuatu yang digunakan guna mendukung terhadap berhasilnya kebijakan yang diimplementasikan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa selama ini memang kader kesehatan yang aktif masih sangat terbatas sehingga perlu adanya dukungan dari kader di tingkat Rt/Rw agar pro aktif untuk membantu dalam melaksanakan kebijakan tentang

pengecahan stunting terhadap masyarakat desa di wilayahnya masing-masing, dan dalam melaksanakan kebijakan tentang pengecahan stunting terhadap masyarakat desa sudah adanya aturan dan mekanisme yang jelas dari mulai tingkat desa sampai dengan pelaksanaan di tingkat Rt/Rw, namun karena kurang fokus sehingga masih ada sebaaian kader yang kurang memahaminya, selain itu kewenangan dalam melaksanakan kebijakan pengecahan stunting terhadap masyarakat di desa merupakan kebijakan dari pemerintah desa dengan di bantu oleh kader kesehatan desa sebagai pelaksana dilapangan, namun memang selama ini komunikasi yang kurang baik sehingga kesulitan untuk melaksanakan kebijakan di lapangan, serta fasilitas pendukung memang belum lengkap tetapi minimal para kader dapat memaksimalkan kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan pengecahan stunting dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di desa, seperti memaksimalkan Poskesdes yang ada di desa.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Agustino (2017:128) menyatakan bahwa : “Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”.

Dengan demikian dalam melaksanakan suatu kebijakan program

perlu di dukung oleh sumber daya yang mumpuni agar dapat membantu dan melaksanakan kebijakan suatu progam secara optimal dan hal ini perlu di dukung dengan fasilitas dan sarana prasarana yang dapat mendukung kebijakan tersebut sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

3. Disposisi

Kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karena itu jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa selama ini untuk penentuan petugas memang di ambil dari kader kesehatan yang aktif di desa, namun memang masih kurang sesuai dengan keilmuannya, tetapi minimal para kader dapat aktif dan memiliki keinginan untuk memahami tentang pengecahan stunting terhadap masyarakat desa, selain itu pada dasarnya memang perlu adanya pembagia tugas terhadap para kader kesehatan di desa karena tidak semua kader memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mumpuni sehingga

kesulitan untuk melakukan pembagian kerja dalam melaksanakan kebijakan tentang stunting di desa, serta adanya anggaran untuk insentif para kader kesehatan di desa sudah ditetapkan dalam APBDDes yang bersumber dari Dana Desa yang dibagikan per periode walaupun memang tidak besar.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Budiarjo, (2015:12) memberikan pengertian mengenai kebijaksanaan (*policy*) yaitu: “Kebijaksanaan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya

Dengan demikian dalam melaksanakan kebijakan suatu program kegiatan perlu didukung dengan keinginan dan kesadaran dari pelaksana untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuannya agar dapat saling menunjang dan dapat dilakukan pembagian kerja secara merata sehingga memiliki tanggung jawab yang jelas dalam melaksanakan kebijakan suatu program kegiatan, selain itu perlu adanya alokasi anggaran yang jelas untuk para pelaksana agar dapat memberikan semangat dan motivasi dalam melaksanakan kebijakan suatu program.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah, guna mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu. Faktor birokrasi pembagian kerja dalam implementasi kebijakan publik, menunjukkan pelaku-pelaku ahli dan profesional dalam tindakan-tindakan mengimplementasikan kebijakan publik.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa selama ini SOP dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting sangat penting agar dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan di lapangan dan hal itu perlu dipahami oleh semua kader kesehatan di desa, namun memang masih ada beberapa kader yang kurang mempelajarinya sehingga kurang memahami secara jelas dan terperinci, selain itu dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting terhadap masyarakat desa perlu adanya standar kerja yang jelas agar dapat melaksanakannya secara optimal, namun memang terkadang belum terlalu dipahami secara jelas dan terperinci, hal ini akan mempersulit dalam melaksanakannya di lapangan, serta perlu adanya pembagian tanggung jawab terhadap para kader kesehatan di desa sehingga dapat lebih terfokus dan dapat memaksimalkan kebijakan

pengecahan stunting terhadap masyarakat desa, namun karena tidak meratanya tingkat pemahaman dari para kader sehingga kesulitan dalam melakukan pembagian tanggung jawab terhadap para kader.

Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Friedrich (Winarno, 2012:16) memberikan pengertiannya sebagai berikut: “Kebijaksanaan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Dengan demikian dalam melaksanakan kebijakan program perlu di dukung dengan SOP dan standar kerja yang jelas agar dapat mempermudah dan dapat meminimalisir kesalahan dalam melaksanakan kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan, selain itu perlu adanya tanggung jawab moral dari para pelaksana dilapangan agar dapat optimal dalam melaksanakan kebijakan program kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan

keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Agustino (2016:137), hal ini dikarenakan masih kurangnya dilakukan komunikasi secara rutin kepada masyarakat, kurangnya dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting, kurangnya sikap pelaksana dalam melaksanakan pencegahan stunting dan kurangnya dukungan struktur birokrasi dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting.

Begitupula dengan hasil observasi diketahui adanya hambatan-hambatan dalam Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis, yang antara lain :

1. Kurangnya dukungan dari pemerintah desa dalam melakukan sosialisasi tentang pencegahan stunting di desa sehingga informasi tidak tersampaikan secara jelas dan terperinci desa, hal ini dikarenakan adanya berbagai kesibukan dari aparatur pemerintah desa
2. Kurangnya program yang jelas dari pemerintah desa untuk menyampaikan informasi tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa secara rutin dan berkelanjutan.
3. Masih adanya perubahan kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pemerintah desapun masih kurang memahami untuk

- melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting di desa.
4. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari para kader kesehatan di desa terhadap pengetahuan tentang stunting, hal ini dikarenakan kurangnya dilakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap para kader kesehatan di desa.
 5. Kurangnya arahan dan penyuluhan terhadap para kader kesehatan di desa terkait dengan aturan dan mekanisme dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting di desa, hal ini dikarenakan adanya kesibukan dari masing-masing sehingga terkadang terlupakan.
 6. Kurangnya koordinasi dari kader kesehatan di desa dalam melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting sehingga kurang mengetahui kewenangan dalam melaksanakannya di lapangan.
 7. Selama ini para kader kesehatan di desa kurang mampu memaksimalkan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di desa sehingga dapat menghambat dalam melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting terhadap masyarakat desa seperti kurang memanfaatkan gedung bidan desa untuk memberikan penyuluhan terhadap masyarakat.
 8. Kurangnya keinginan dari para kader kesehatan untuk mempelajari pengetahuan tentang pencegahan stunting sehingga terkadang kesulitan untuk memberikan tugas yang sesuai dengan keahliannya.
 9. Kurang meratanya kemampuan dan pemahaman dari para kader kesehatan di desa sehingga kesulitan untuk memberikan pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuannya, hal ini dikarenakan kurangnya kader mengikuti pengarah dan penyuluhan tentang pencegahan stunting.
 10. Sebenarnya untuk insentif terhadap para kader kesehatan di desa tidak ada masalah karena sudah ditetapkan dalam APBDes yang bersumber dari Dana Desa, tinggal pembagiannya terhadap para kader yang terkadang memang suka ada keterlambatan.
 11. Kurang fokusnya kader kesehatan desa dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting di desa sehingga terkadang kurang memahami SOP dalam pelaksanaan pekerjaannya, hal ini akan menghambat dalam melaksanakannya di lapangan.
 12. Sebagian kader kesehatan di desa kurang mempelajari standar kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga dapat mempersulit untuk melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting di desa.
 13. Kurangnya komunikasi dari pemerintah desa terhadap para kader kesehatan di desa sehingga terkadang kurang memahami tanggung jawab dari masing-masing kader dalam melaksanakan

kebijakan pencegahan stunting di desa dan hal ini akan mempersulit untuk memberikan tanggung jawab pekerjaan terhadap para kader kesehatan di desa.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan upaya-upaya yang dilakukan dalam pencegahan stunting antara lain :

1. Melakukan komunikasi dengan pemerintah desa maka sudah ada dukungan secara penuh untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan stunting di desa dengan berbagai cara, baik itu secara langsung maupun dengan membagikan bantuan kesehatan terhadap masyarakat desa
2. Pemerintah desa sudah memprioritaskan pelaksanaan program kebijakan pencegahan stunting terhadap masyarakat desa, yaitu salah satunya dengan menggiatkan program posyandu di sekitar desa
3. Melakukan diskusi dengan pemerintah desa tentang kebijakan stunting sehingga dapat menyamakan pendapat dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting di desa sehingga tidak ada perubahan kebijakan dan hal ini akan meningkatkan konsistensi bagi kader kesehatan di desa dalam pelaksanaan di lapangan
4. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap para kader kesehatan di desa agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuannya tentang pencegahan stunting sehingga dapat mempermudah untuk melaksanakannya di lapangan
5. Pemerintah desa sudah memberikan perhatian untuk memberikan penyuluhan dan arahan terhadap para kader kesehatan di desa terkait dengan aturan dan mekanisme dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting di desa
6. Para kader kesehatan sudah melakukan koordinasi dengan baik sehingga dapat mengetahui batas kewenangan dalam melaksanakan kebijakan stunting di lapangan
7. Melakukan pertemuan dengan kader kesehatan di desa untuk melakukan musyawarah tentang penggunaan fasilitas dan sarana prasarana yang ada di desa untuk melaksanakan kebijakan pencegahan stunting di desa sehingga fasilitas yang ada di desa dapat dioptimalkan
8. Melakukan pendekatan terhadap para kader kesehatan di desa memiliki keinginan untuk mempelajari pengetahuan tentang pencegahan stunting sehingga dapat mempermudah untuk memberikan tugas yang sesuai dengan keahliannya
9. Melakukan penyuluhan dan arahan dari pemerintah desa terhadap para kader kesehatan agar dapat meningkatkan kemampuan dan pemahamannya sehingga dapat mempermudah untuk melakukan

- pembagian kerja yang sesuai dengan kemampuannya
10. Mengupayakan untuk membagikan insentif terhadap kader kesehatan tepat pada waktunya karena untuk insentif terhadap para kader kesehatan di desa tidak ada masalah karena sudah ditetapkan dalam APBDes yang bersumber dari Dana Desa
 11. Melakukan komunikasi dan pendekatan terhadap para kader kesehatan di desa untuk selalu aktif untuk memahami SOP dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga dapat mempermudah untuk melaksanakannya di lapangan
 12. Membuat kesepakatan dengan para kader di desa untuk bersama-sama mempelajari dan memahami standar kerja dalam pelaksanaan pekerjaannya sehingga dapat mempermudah untuk melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting di desa
 13. Membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa agar dapat memahami tanggung jawab dalam melaksanakan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tentang pencegahan stunting di desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis, dapat penulis simpulkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh

Desa Saguling Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Agustino (2016:137), hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi yang dilakukan pemerintah desa dengan masyarakat dalam melakukan pencegahan stunting karena kurangnya sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait kebijakan pencegahan stunting sehingga belum konsisten dalam memberikan perintah dalam pencegahan stunting, selain itu keterbatasan sumber daya yang ada dalam melaksanakan pencegahan stunting di desa karena kurang didukung dengan sejumlah kompetensi petugas pelaksana dan pemahaman terhadap mekanisme yang kurang sehingga petugas kesulitan dalam melaksanakan kewenangannya selain itu kurangnya dukungan fasilitas yang diberikan kepada petugas serta sikap pelaksana atau disposisi yang kurang baik karena ketidaksesuaian dalam menentukan petugas pelaksana dan kurangnya kesesuaian dalam pembagian kerja sehingga menyebabkan motivasi petugas masih kurang, selain itu secara struktur organisasi petugas masih kurang memahami SOP sebagai pedoman dalam mengimplementasikan kebijakan dan kurangnya pemahaman terhadap standar kerja bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pencegahan stunting serta kurangnya dilakukan

pembagian kerja bagi petugas dalam melaksanakan pencegahan stunting. Begitupula dengan observasi yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi kebijakan pencegahan stunting belum optimal mengingat kurangnya program yang jelas dari pemerintah desa mengenai pencegahan stunting dan kurangnya dukungan anggaran yang diberikan kepada masyarakat serta jaranganya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini kader kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dengan pencegahan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2014). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Buku Saku Stunting Desa dalam Penanganan Stunting. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 2017
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- Santoso, (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Supariasa dkk. (2012). *Penilaian Status Gizi*. EGC. Jakarta.
- Surbakti, Ramlan (2013), *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Syafiie, inu kencana, (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Edisi Revisi (CV. Mandar. Maju: Bandung.
- Winarno, Budi .(2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS